

**LAPORAN KINERJA**  
**KECAMATAN KADUR KABUPATEN**  
**PAMEKASAN TAHUN 2021**



**KECAMATAN PAMEKASAN**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan kadur merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan tahun 2021 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatankinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Kadur. Kinerja Kecamatan Kadur diukur atas dasarpenilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategissebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian KinerjaKecamatan Kadur tahun 2021

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatandan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Kadur tahun 2021 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kadur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kecamatan Kadur secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 14 Februari 2022

**CAMAT KADUR**

**MOHAMMAD JASIN, M.Si**

Pembina TK I

NIP.19760502 199414 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BABIPENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	5
D. Landasan Hukum .....	6
E. Sistematika .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis .....	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	74
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	77
B. Realisasi Anggaran .....	129
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	145
BAB IV PENUTUP .....	165
LAMPIRAN .....	168
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH .....	168
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	173
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM PERUBAHAN.....	175
INDIKATOR KINERJA UTAMA SETELAH PERUBAHAN.....	178
PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN KEPALA PERANGKAT DAERAH .....	181

PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN KEPALA PERANGKAT DAERAH .....	184
MATRIKS RENSTRA SEBELUM PERUBAHAN.....	186
MATRIKS RENSTRA SETELAH PERUBAHAN.....	219
MATRIKS RENJA SEBELUM PERUBAHAN.....	286
MATRIKS RENJA SETELAH PERUBAHAN.....	329

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kadur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas,

terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

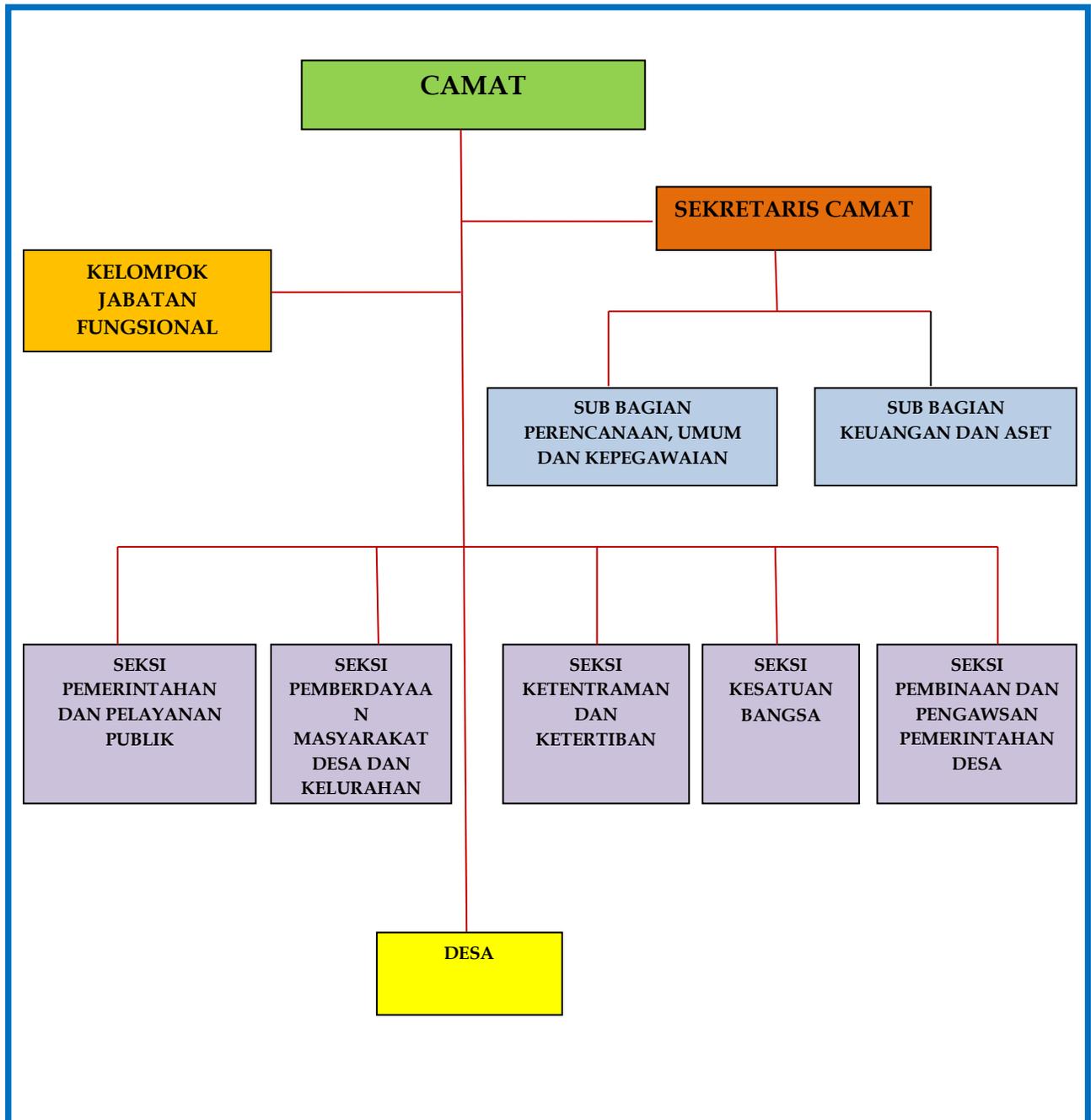
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

- Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Kesatuan Bangsa dan Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pamekasan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government);
3. Penguatan kemandirian desa melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif;
5. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra Kecamatan Pamekasan periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan

- b. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).
- c. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tatakelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.
- e. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Kadur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 adalah :

- |         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN  |
|         | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II  | PERENCANAAN KINERJA  |
|         | Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu   |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA  |
|         | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan     |
| BAB IV  | PENUTUP  |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan  
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Pemenihan Kualitas Infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan

5. Pengelolaan Potensi sosial, Nilai- nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk mewujudkan Masyarakat Yang harmonis serta sejahtera.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Kadur mengacu pada Misi ke-3, yaitu : **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1.	Meningkatkan Efektivitas layanan administrasi dan Operasional perangkat daerah	Pelaksanaan fungsi operasioanal dan administrasi perangkat daerah yang efektif dn efisien	Indeks Kepuasan Kinerja Unit	-	3,50	3,65	3,70	3,90
			Persentase kegiatan yang sesuai SOP	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Nilai Evaluasi Sakip	A	A	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik ( IPP)	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
			Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	72	74	76	78	80
<b>Setelah Perubahan</b>								
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan		Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	3,51	3,76	3,80	4,00	4,02
		Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	A	A	A	(A)	(A)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan	-	-	80	82	85

		Publik Kecamatan	Masyarakat ( IKM )					
		Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	N.a	N.a	97 %	98 %	99 %
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	N.a	N.a	95 %	96 %	99 %
			Prosentase Desa yang telah dibina	N.a	N.a	98 %	99 %	100 %

*Sumber : Renstra Kecamatan Kadur periode 2018-2023*

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
<b>Sebelum Perubahan</b>						
1.	Meningkatkan efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah	1.1. Indeks kepuasan unit kerja	Indeks	Merupakan barometer keberhasilan atas pencapaian kinerja	<p style="text-align: center;">Nilai per aspek</p> <p style="text-align: center;">- ----- x bobot per indikator</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p>- Nilai per aspek = <math>\Sigma</math>Nilai per indikator</p> <p>- Nilai Indeks = <math>\Sigma</math>(nilai aspek<sub>n</sub> x bobot aspek<sub>n</sub>)</p>	Data Layanan
2	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	2.1. Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	%	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<p style="text-align: center;">Jumlah Kegiatan yang Sesuai dengan SOP</p> <p style="text-align: center;">- ----- x 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Seluruh Kegiatan</p>	SOP Kegiatan

		2.2	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Berdasarkan Nilai Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP	Inspektorat Kabupaten Pamekasan
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	3.1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	<p>Nilai F01 + nilai F02 + nilai F03</p> <p>- ----- x bobot per indikator</p> <p>3</p> <p>- Nilai per aspek = <math>\Sigma</math>Nilai per indikator</p> <p>- Nilai Indeks = <math>\Sigma(\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)</math></p>	Kementrian PAN dan RB
4	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	<p>Total Dari Nilai Pesepsi Per Unsur</p> <p>- ----- x Nilai Perimbang</p> <p>Total Unsur Yang Terisi</p> <p>IKM unit Pelayanan x 25</p>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

**Setelah Perubahan**

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan		1.1.	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	Indeks	Permenpan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	<p>Nilai F01 + nilai F02 + nilai F03</p> <p>- ----- x bobot per indikator</p> <p>3</p> <p>- Nilai per aspek = <math>\Sigma</math>Nilai per indikator</p> <p>- Nilai Indeks = <math>\Sigma</math>(nilai aspek<sub>n</sub> x bobot aspek<sub>n</sub>)</p>	Kementrian PAN dan RB
1	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	2.1	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Berdasarkan Nilai Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP	Inspektorat Kabupaten Pamekasan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.2	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Nilai	PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	<p>Total Dari Nilai Pesepsi Per Unsur</p> <p>- ----- x Nilai Perimbang</p> <p>Total Unsur Yang Terisi</p> <p>IKM unit Pelayanan x 25</p>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	2.3	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	%	Permendagri NO. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	<p>Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi</p> <p>-----x100 %</p> <p>jumlah seluruh penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p>	Laporan/Dokumen Trantib

4.	Meningkatnya Pembedayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	2.4	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	%	UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	$\frac{\text{Jumlah desa/Kelurahan yang masyarakatnya diberdayakan}}{\text{Jumlah total desa /Kelurahan di wilayah kecamatan}} \times 100 \%$	Laporan/Dokumen Trantib
		2.5	Prosentase Desa yang telah dibina	%	United Nation Development Program (UNDP)	$\frac{\text{Jumlah desa yang telah dibina}}{\text{Jumlah total desa di wilayah kecamatan}} \times 100 \%$	Laporan/Dokumen Trantib

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Tahun 2021*

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2021 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2021 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2021**  
**Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan		Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP )	Indeks	4,01
		1.1 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	Nilai	81,00(A)
		1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Indeks	3,80
		1.3 Meningkatnya	Persentase	Persen	95%

		Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani		
	1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	96 %
			Prosentase Desa yang telah dibina	Persen	98 %

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2021

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.	Nilai Evaluasi Sakip	Angka	91,00 (A)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1	Persentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan secara berkualitas	persen	94 %
		2.2	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	persen	94 %
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	persen	97 %
		3.2	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	persen	97 %
		3.3	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	persen	97 %
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	4.1	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	persen	95 %
		4.2	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	persen	95 %
		4.3	Prosentase Desa yang	persen	98 %

			telah dibina		
		4.4	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	persen	98 %

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2021*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Kadur :

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan Kecamatan Kadur Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	75 %	35.000.000
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	83,33 %	5.163.562.310
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80 %	2.061.793.239
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	85 %	5.354.663.348
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	8 dokumen, 4 evaluasi	35.000.000
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6 Dokumen	35.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	5.163.562.310
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	12 Bulan	4.990.762.310
7.01.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	6 orang	43.200.000

	Keuangan SKPD	SKPD		
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>17 ASN</b>	<b>97.685.500</b>
7.01.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	200 Unit	49.835.500
7.01.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	17 ASN	47.850.000
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>212 Jasa</b>	<b>1.964.107.739</b>
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	500 Surat	10.680.000
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 Jasa	47.098.404
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jasa	40.000.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>70 Sarana</b>	<b>243.820.000</b>
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7 Komponen	5.000.000
7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	400 Logistik	21.000.000
7.01.01.	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Rapat Koordinasi dan	4 Rapat	39.920.000

2.06.9	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	koordinasi	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah prasarana yang layak fungsi</b>	<b>120 Prasarana</b>	<b>2.299.368.859</b>
7.01.01.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Kendaraan	27.8.950.000
7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Mebel	19.777.000
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	8 Unit	267,675,150
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>65 Pengadaan</b>	<b>749.681.250</b>
7.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	12 Jasa	10,860,000
7.01.01.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	5 Mebel	5,803,000
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Gedung Kantor	44,996,460

<i>II</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</i>	<i>3.80</i>	<i>553.240.100</i>
7.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan</b>	<b>100 %</b>	<b>553.240.100</b>
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait</b>	<b>100 %</b>	<b>73.556.250</b>
7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan kecamatan yang efektif	11 Kegiatan	73,556,250
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan</b>	<b>100 %</b>	<b>439.683.850</b>
7.01.02.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan minimal diwilayah Kecamatan	4 Fasilitas	15.000.000
7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	21 Layanan	95,264,000
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Kewenangan lain urusan pemerintahan yang terfasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>40.000.000</b>
7.01.02.	Pelaksanaan Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang	1 urusan	40.000.000

2.04.3	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terkait Dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan</i></b>	<b><i>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan</i></b>	<b>88 %</b>	<b>16.369.057.759</b>
'7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	88 %	16.369.057.759
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	77.77 %	190.000.000
7.01.03.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok Masyarakat Desa dalam Forum Musrenbangdes	9 Kelompok	10.000.000
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya.	12 Kegiatan	180,000,000
<b>III</b>	<b><i>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</i></b>	<b><i>Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani</i></b>	<b>85 %</b>	<b>265.337.500</b>
'7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	85 %	231.631.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	85 %	213.631.000

7.01.04. 2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas /koordinasi yang diselenggarakan	8 Kegiatan	57,500,000
7.01.04. 2.01.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	8 Kegiatan	156,131,000
7.01.05	<b>Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik</b>	<b>85 %</b>	<b>51.706.500</b>
7.01.05. 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</b>	<b>85 %</b>	<b>51.706.500</b>
7.01.05. 2.01.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	6 konflik	51,706,500
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i></b>	<b><i>Prosentase Desa yang telah dibina</i></b>	<b>80 %</b>	<b>55.961.000</b>
7.01.06	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik</b>	<b>80 %</b>	<b>55.961.000</b>
7.01.06. 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>	<b>80 %</b>	<b>55.961.000</b>

7.01.06. 2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dengan baik	9 Desa	15,961,000
7.01.06. 2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	5 Desa	40,000,000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
4. Pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2021 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.1	Nilai Evaluasi Sakip	Angka	91,00 (A)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Indeks	94 %
3.	Meningkatnya	3.1	Persentase	Persen	97 %

	Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan		Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani		
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	4.1	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	Persen	95 %
		4.2	Prosentase Desa yang telah dibina	Persen	98 %

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2021

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Kadur Tahun 2021**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	75 %	36.294.000
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	83,33 %	3.264.223.296
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80 %	1.853.956.205
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100 %	1,442,242,650
7.01.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		

7.01.01.2 .01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		
7.01.01.2 .02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1,268,547,972</b>
7.01.01.2 .02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	14 Bulan	1,241,522,972
7.01.01.2 .02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Verifikasi	27,025,000
7.01.01.2 .08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	3 Jasa	12,000,000
7.01.01.2 .06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>70 Sarana</b>	<b>243.820.000</b>
7.01.01.2 .06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Komponen	4,000,000
7.01.01.2 .06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 Komponen	4,000,000
7.01.01.2	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang</b>	<b>65 Pengad</b>	<b>749.681.250</b>

<b>.09</b>	<b>Pemerintahan Daerah</b>	<b>Milik Daerah</b>	<b>aan</b>	
7.01.01.2 .09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	19,000,000
7.01.01.2 .09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	2 Unit	30,000,000
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>3.80</b>	<b>11,000,000</b>
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	95 %	11,000,000
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	95 %	11,000,000
7.01.02.2 .01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan kecamatan yang efektif	3 Kegiatan	10.000.000
7.01.02.2 .02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan	98 %	5,000,000

7.01.02.2 .02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	5 Kegiatan	4,000,000
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan/Kelurahan</i></b>	<b><i>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan</i></b>	<b>96 %</b>	<b>17,000,000</b>
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat	98 %	26,000,000
7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	99 %	13,000,000
7.01.03.2 .01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok Masyarakat Desa dalam Forum Musrenbangdes	1 Partisipasi	10.000.000
7.01.03.2 .01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya.	2 Kegiatan	3,000,000
7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat Desa yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan desa	83,33 %	9.849.051.641
<b>III</b>	<b><i>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</i></b>	<b><i>Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani</i></b>	<b>98 %</b>	<b>41,000,000</b>
7.01.04	Program Koordinasi	Persentase	99 %	41,000,000

	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti</b>		
7.01.04.2 .01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>99 %</b>	<b>41,000,000</b>
7.01.04.2 .01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas /koordinasi yang diselenggarakan	3 Koordinasi	8,000,000
7.01.04.2 .01.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	1 Kegiatan	33,000,000
7.01.05	<b>Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik</b>	<b>99 %</b>	<b>13.000.000</b>
7.01.05.2 .01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan</b>	<b>99 %</b>	<b>13.000.000</b>
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i></b>	<b><i>Prosentase Desa yang telah dibina</i></b>	<b>80 %</b>	<b>40.000.000</b>

7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik	10 Desa	3.000.000
7.01.06.2 .01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa	99 %	13,000,000
7.01.06.2 .01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	5 Desa	9,793,750

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 (setelah perubahan)

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan

Visi dan Misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kadur Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kadur Tahun 2021**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP )	4,01	-	-		
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	81,30(A)	81,38 (A)	100,09 %	Sangat Baik	LHE SAKIP Tahun 2021
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3,80	3,80	100 %	Baik	Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	85 %	81 %	95 %	Cukup	Evaluasi Renja 2021
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang	88 %	86 %	97 %	Cukup	Evaluasi Renja 2021

	Pembinaan Desa / Kelurahan	telah diberdayakan					
		Prosentase Desa yang telah dibina	80 %	73 %	93 %	Cukup	Evaluasi Renja 2021

Indeks pelayanan publik pada tahun 2021 di targetkan sebesar 4,01 dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan ) dengan nilai sebesar 81,30 dan capaian kinerja sebesar 100.09 % atau kategori Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,80 dengan angka Indeks sebesar 3,80 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah kecamatan.

Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditanganidengan Target 2021 sebesar 85 %, Realisasi sebesar 80 % dan capaian kinerja sebesar 95 % atau kategori cukup. Sedangkan untuk Indikator Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakandengan Target 2021 sebesar 88 %, Realisasi sebesar 86 % dan capaian kinerja sebesar 97 % atau kategori cukup.

Indikator Kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan Target 2021 sebesar 80 %, Realisasi sebesar 73 % dan capaian kinerja sebesar 93 % atau kategori cukup. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2020 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Sebelum Perubahan</b>								
1	Meningkatkan efektifitas layanan administrasi dan operasional perangkat daerah	Indeks kepuasan unit kerja	3,50	3,519	100,54 %			
2.	Pelaksanaan fungsi operasional dan administrasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	90%	90,72%	100,80 %			
		Nilai Hasil Evaluasi Sakip	81 (A)	81,23 (A)	100,28 %			
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,76	-	-			
4.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,75	3,75	100 %			
<b>Setelah Perubahan</b>								
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP )				4,01	NA	NA

	pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan							
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip				81,30(A)	81,38 (A)	100,09%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )				3,80	3,80	100 %
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani				85 %	81 %	95 %
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan				88 %	86 %	97 %
		Prosentase Desa yang telah dibina				80 %	73 %	93 %

Hasil Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 81 (A), dengan realisasi kinerja 81,23 (A) dan capaian kinerja sebesar 100,28% atau kategori Sangat Baik. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 81,30 (A), dan capaian kinerja sebesar 100,09 % atau kategori Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan pada tahun 2020 ditargetkan 3,75 dengan realisasi sebesar 3,75 dan capaian kinerja sebesar 100% atau katagori baik. Sementara pada tahun 2021 target untuk Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM ) 3,80 dengan realisasi sebesar 3,80 dan Capaian kinerja sebesar 100 % atau kategori baik.

Untuk indikator kinerja pada tahun 2021 ada perubahan nomenklatur sesuai dengan permendagri 90 tahun 2020. Sehingga indikator yang digunakan berubah tidak sama dengan indikator pada tahun 2020.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP )	4,01	4,51	88,91 %
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	81,00 (A)	81,00 (A)	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3,80	3,87	90 %
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah	97 %	99 %	97,98 %

		kecamatan yang ditangani			
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	95 %	96 %	98,96 %
		Prosentase Desa yang telah dibina	98 %	98 %	100 %

1. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan dengan indicator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP) capaian pada tahun 2021 adalah NA sedangkan target akhir 2023 adalah 4,51 sehingga tingkat kemajuan juga NA.
2. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indicator Kinerja Indeks Nilai Evaluasi Sakip tingkat kemajuan Sebesar 99,97 %.
3. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indicator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan capaian pada tahun 2021 3,80 sedangkan target akhir 2023 adalah 3,87 sehingga tingkat kemajuan juga 95%
4. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatkan Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indicator Kinerja Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani, dengan capaian pada tahun

2021 95% sedangkan target akhir 2023 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan juga 95%.

5. Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir renstra untuk tujuan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator Kinerja Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan, dengan capaian pada tahun 2021 97% sedangkan target akhir 2023 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan juga 97%.sedangkan untuk indikator kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan capaian pada tahun 2021 93% sedangkan target akhir 2023 adalah 100% sehingga tingkat kemajuan juga 93%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP )	-	3,25	-
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	81,38 (A)	75	108,51 %
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	3,80	3,00	126,6 %
4.	Meningkatnya Ketentraman	Persentase	81 %	-	-

	dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani			
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	86 %	-	-
		Prosentase Desa yang telah dibina	73 %	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	4,01	-	-		
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	81,30(A)	81,38 (A)	100,09%	<b>Berhasil</b> karena adanya Dokumen SAKIP yang selaras	Memperhatikan/terus melengkapi Dokumen Sakip berdasarkan di LHE
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,80	3,80	100%	<b>Berhasil</b> karena adanya Kinerja aparatur dan dukungan partisipasi masyarakat	Memperhatikan/Meningkatkan kualitas Pelayanan
4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	85 %	81 %	95 %	<b>Gagal</b> , karena Ada pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2021, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran.	Akan dilanjutkan pada tahun Selanjutnya
5.	Meningkatnya	Persentase	88 %	86 %	97 %	<b>Gagal</b> , karena Ada pandemi Coronavirus	Akan dilanjutkan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan				disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2021, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran.	an pada tahun selanjutnya
	Prosentase Desa yang telah dibina	80 %	73 %	93 %	<b>Gagal</b> , karena Ada pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sejak awal triwulan I tahun 2021, berdampak terjadi pergeseran target kinerja dan anggaran secara Nasional melalui efisiensi dan refocusing anggaran.	Akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya

Berdasarkan tabel di atas Pada Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menunjukkan kategori peringkat A (Memuaskan) dengan nilai sebesar 81,38. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3,80 dengan angka Indeks sebesar 3,80 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 - 100,00. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

## Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menun- jang/Ti- dak Menun- jang
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	NA	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	0,8 %	Tidak menunjang
2.	<i>Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai Evaluasi Sakip</i>	3,81 (A)		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	0,8 %	Tidak menunjang
					Persentase peningkatan kompetensi aparatur	0,8 %	Tidak menunjang
					Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	0,8 %	Tidak menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi	50 %	Tidak Menujng

					<b>kinerja yang disusun tepat waktu</b>		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	75 %	Menu njang
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik</b>	<b>100 %</b>	<b>Menu njang</b>
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	100 %	Menu njang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	Menu njang
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang terfasilitasi</b>	<b>73 %</b>	<b>Menu njang</b>
S				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan	73 %	Menu njang

				dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan</b>	<b>100 %</b>	<b>Menu njang</b>
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 %	Menu njang
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah sarana yang layak fungsi</b>	<b>100 %</b>	<b>Menu njang</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 %	Menu njang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	49 %	Tidak Menu njang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 %	Menu njang
				Penyelenggaraan	Jumlah Rapat	75	Menu

				Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	%	njang
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>28 %</b>	<b>Tidak menu njang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100 %	Menu njang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	100 %	Menu njang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	86 %	Menu njang

3.	<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</i>	100 %				<i>Menunjang</i>
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase jenis pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai pedoman standar pelayanan	100 %	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100 %	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan kecamatan yang efektif	27 %	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang	100 %	Menunjang

				<b>Kecamatan</b>	<b>diselenggarakan</b>		
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan masyarakat yang ditingkatkan efektifitasnya	100 %	Menu njang
4.	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	<i>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang telah diberdayakan</i>	100 %				<i>Menunjang</i>
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase desa/kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>Menu njang</b>
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>Menu njang</b>
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah partisipasi Kelompok Masyarakat Desa dalam Forum Musrenbangdes	100 %	Menu njang

				Pembangunan di Desa			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelompok masyarakat desa yang meningkat efektifitasnya.	67 %	Tidak Menu njang
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan Desa</b>	<b>83 %</b>	<b>Menu njang</b>
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi Kelompok Masyarakat kelurahan dalam Forum Musrenbangdes	100 %	Menu njang
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )</b>	<b>Prosentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) yang terfasilitasi</b>	<b>75 %</b>	<b>Menu njang</b>

5.	<i>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</i>	<i>Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani</i>	100 %				<i>Menujang</i>
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan/gangguan di wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan yang terfasilitasi	100 %	Menujang
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas /koordinasi yang diselenggarakan	33 %	Tidak Menujang
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	Jumlah Kegiatan harmonisasi yang diselenggarakan	100 %	Menujang

				Tokoh Masyarakat			
				Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan baik	100 %	Tidak Menu njang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	100 %	Tidak Menu njang
				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	27 %	Tidak Menu njang
6.	<i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i>	<i>Prosentase Desa yang telah dibina</i>	100 %				<i>Menu njang</i>
				Program	Persentase desa	100 %	Menu njang

				<b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>yang menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik</b>		
				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa</b>	<b>100 %</b>	<b>Menu njang</b>
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	100 %	Menu njang

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas menunjukkan 5 Program mengalami keberhasilan dan kegagalan sebanyak 1 Program dan 76 dan 230 Sub Kegiatan. Sebanyak 75 Kegiatan diantaranya menunjukkan keberhasilan sementara sisanya sebanyak 1 kegiatan mengalami kegagalan disebabkan terdapat dana PAK ( berbentuk pekerjaan fisik ) yang diterima pada triwulan ke empat sehingga menyebabkan Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan kurang sehingga pekerjaan pembangunan /kontruksi masih dalam proses pekerjaan dan juga refocusing anggaran covid-19. Adapun faktor -faktor yang mempengaruhi program keberhasilan sebagai berikut :

- A. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta

penggalian dan pengolahan sumber potensi Desa/Kelurahan Mengadakan Penyuluhan dan Intensifikasi PBB ke desa-desa guna pelunasan PBB yang tepat waktu;

- B. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Kadur sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- C. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dan kelembagaan di SKPD Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;

Sedangkan untuk solusi terkait program atau kegiatan yang mengalami kegagalan atau tidak berhasil adalah bahwa kegiatan tersebut akan di anggarkan pada tahun selanjutnya

**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
-----	-------------------------------	---------------	----------------	----------

<b>1.</b>	<b>Program Penujng Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.519.923.251</b>	<b>5.282.520.877</b>	<b>96 %</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36,294,000</b>	<b>36,294,000</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,294,000	36,294,000	100%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.264.223.296</b>	<b>3.105.748.158</b>	<b>95 %</b>
7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,124,223,296	2.985.748.158	96 %
7.01.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34,400,000	34,400,000	100 %
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.026.000</b>	<b>24.026.000</b>	<b>100%</b>
7.01.01.2.05.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.026.000	24.026.000	100%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.829.930.205</b>	<b>1.793.633.888</b>	<b>98 %</b>
7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.680.000	10.860.000	100 %
7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,440,000	28.315.750	100 %
7.01.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,050,000	36.050.000	100%
7.01.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.800.000	241.800.000	100 %
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>243.820.000</b>	<b>140.869.151</b>	<b>95 %</b>
7.01.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100%
7.01.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000	20.540.000	98 %
7.01.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,500,000	16,500,000	100%
7.01.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	22.871.901	76%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>749.681.250</b>	<b>181.949.680</b>	<b>86%</b>

7.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,301,000	64.301.000	100%
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,239,000	16,239,000	100%
7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8,080,000	7.880.000	98%
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</i></b>	<b>553.240.100</b>	<b>55.514.000</b>	<b>97%</b>
<b>7.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>40.000.000</b>	<b>55.514.000</b>	<b>97%</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>
7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>47.306.000</b>	<b>45.514.000</b>	<b>94%</b>
7.01.02.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	30.000.000	100%
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa/Kelurahan</i></b>	<b>13.325.832.816</b>	<b>12.316.474.676</b>	<b>74%</b>
<b>7.01.03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>13.325.832.816</b>	<b>12.316.474.676</b>	<b>93%</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>
7.01.03.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	100%
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,000,000	30,000,000	100%

<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>9.849.051.641</b>	<b>9.716.545.241</b>	<b>99%</b>
7.01.03.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000	10.000.000	100%
<b>7.01.03.2.05</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )</b>	<b>3.431.981.175</b>	<b>2.559.929.435</b>	<b>75%</b>
<b>III</b>	<b><i>Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan</i></b>	<b>213.340.000</b>	<b>168.050.000</b>	<b>79%</b>
<b>7.01.04</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>198.340.000</b>	<b>153.050.000</b>	<b>77%</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>198.340.000</b>	<b>153.050.000</b>	<b>77%</b>
7.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.390.000	36.830.000	94%
7.01.04.2.01.1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	159.010.000	116.220.000	73%
<b>7.01.05</b>	<b>Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100%</b>
7.01.05.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	15.000.000	100%
<b>II</b>	<b><i>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa /Kelurahan</i></b>	<b>40.000.000</b>	<b>33.223.000</b>	<b>73 %</b>
<b>7.01.06</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>40.000.000</b>	<b>33.223.000</b>	<b>73 %</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>40.000.000</b>	<b>33.223.000</b>	<b>73 %</b>
7.01.06.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala	40,000,000	33.223.000	73 %

	Desa			
--	------	--	--	--

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	4,01	-	-	22.853.583.242	17.853.568.553	79%	-
2	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,30(A)	-	-	5.519.923.251	5.280.306.877	95%	-
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	3,80	3,80	100%	57.306.000	55.514.000	97%	3%

4.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	85%	81%	95%	213.340.000	168.050.000	79%	16%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	88%	86%	97%	16.753.013.991	12.316.474.676	74%	23%
		80%	75%	93%	40.000.000	33.223.000	83%	10%

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan analisis efisien dan efektifitas anggaran adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1.	Program Penujang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,30 (A)	-	-	5.519.923.251	5.282.520.877	96 %	-
7.01.0	Perencanaan, Penganggaran, dan	6	6	100%	36,294,000	36,294,000	100%	0%
1.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							

7.01.0 1.2.01 .1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100%	36,294,000	36,294,000	100%	0%
<b>7.01.0 1.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>3.264.223.296</b>	<b>3.105.748.158</b>	<b>95 %</b>	<b>0%</b>
7.01.0 1.2.02 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	100%	3,124,223,296	2.985.748.158	96 %	0%
7.01.0 1.2.02 .3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	6	100%	34,400,000	34,400,000	100 %	0%
<b>7.01.0 1.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>94%</b>	<b>24.026.000</b>	<b>24.026.000</b>	<b>100%</b>	<b>-6 %</b>
7.01.0 1.2.05 .2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16	16	94%	24.026.000	24.026.000	100%	-6%
<b>7.01.0 1.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>100%</b>	<b>1.829.930.205</b>	<b>1.793.633.888</b>	<b>98 %</b>	<b>2%</b>
7.01.0 1.2.08 .1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	500	100%	10.680.000	10.860.000	100 %	0%
7.01.0 1.2.08 .2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	3	100%	28,440,000	28.315.750	100 %	0%
7.01.0 1.2.08 .3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100%	36,050,000	36.050.000	100%	0%
7.01.0 1.2.08 .4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17	17	100 %	241.800.000	241.800.000	100 %	0%
<b>7.01.0 1.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>93%</b>	<b>243.820.000</b>	<b>140.869.151</b>	<b>95 %</b>	<b>-2%</b>
7.01.0 1.2.06 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7	7	100%	5.000.000	5.000.000	100%	0%
7.01.0 1.2.06 .4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200	196	98%	21.000.000	20.540.000	98 %	0%

7.01.0 1.2.06 .5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500	500	100%	16,500,000	16,500,000	100%	0%
7.01.0 1.2.06 .9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	3	75%	30.000.000	22.871.901	76%	-1%
<b>7.01.0 1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>94%</b>	<b>749.681.250</b>	<b>181.949.680</b>	<b>86%</b>	<b>8%</b>
7.01.0 1.2.09 .2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100%	64,301,000	64.301.000	100%	0%
7.01.0 1.2.09 .9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100%	16,239,000	16,239,000	100%	0%
7.01.0 1.2.09 .9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	6	100%	8,080,000	7.880.000	98%	0%
<b>7.01.0 2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>55.514.000</b>	<b>97%</b>	<b>-2%</b>
<b>7.01.0 2.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
7.01.0 2.2.01 .2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	3	100%	10.000.000	10.000.000	100%	0%
<b>7.01.0 2.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>47.306.000</b>	<b>45.514.000</b>	<b>94%</b>	<b>0%</b>
7.01.0 2.2.02 .3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21	21	100%	30.000.000	30.000.000	100%	0%
<b>7.01.0 3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>88%</b>	<b>86%</b>	<b>98%</b>	<b>13.325.832.816</b>	<b>12.316.474.676</b>	<b>93%</b>	<b>5%</b>

7.01.0 3.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	77,77 %	77,77 %	100%	40.000.000	40.000.000	100%	0%
7.01.0 3.2.01 .1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9	9	100%	10.000.000	10.000.000	100%	0%
7.01.0 3.2.01 .3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	20	100%	30.000,000	30.000,000	100%	0%
7.01.0 3.2.05	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )</b>	83,33 %	80%	96%	3.431.981.175	2.559.929.435	75%	21%
7.01.0 4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	85%	81%	95%	198.340.000	153.050.000	77%	18%
7.01.0 4.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	85%	81%	95%	198.340.000	153.050.000	77%	1%
7.01.0 4.2.01 .1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	100	39.390.000	36.830.000	94%	6%
7.01.0 4.2.01 .1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	7	88%	159.010.000	116.220.000	73%	15%
7.01.0 5	<b>Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	85%	85%	100%	15.000.000	15.000.000	100%	0%
7.01.0 5.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	85%	85%	100%	15.000.000	15.000.000	100%	0%
7.01.0 5.2.01 .5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3	3	100%	15.000.000	15.000.000	100%	0%
7.01.0 6	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	80%	73%	91%	40.000.000	33.223.000	73 %	18%
7.01.0 6.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	80%	73%	91%	40.000.000	33.223.000	73 %	18%
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	5	100%	40,000,000	33.223.000	73 %	27%

.6								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas Pencapaian kinerja program dan kegiatan serta Sub Kegiatan Kecamatan Kadur anggaran tahun 2021 dalam menjalankan aktifitasnya tingkat efisiensi sebanyak 6 program dengan 67 kegiatan 230 Sub Kegiatan dengan total efisiensi 9,59 %.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan dengan Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP ) dengan capaian kinerja sebesar N/A% (kategori N/A)
- Sasaran 1, Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Sakip dengan capaian kinerja sebesar 100,09 % (kategori Sangat Baik )
- Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

- Sasaran 3, Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 95% (kategori Cukup)
- Sasaran 4 terdiri dari 2, yang Pertama Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator kinerja Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan dengan capaian kinerja sebesar 97% (kategori Cukup)
- Sasaran 4 yang kedua, Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan dengan indikator kinerja Prosentase Desa yang telah dibina dengan capaian kinerja sebesar 93% (kategori Cukup)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 22.583.583.242 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17.996.388.953, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 serapan anggaran sebesar 80% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 91%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Kekurangan yang terjadi selama 2021 ini menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari

pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 14 Februari 2022

**CAMAT KADUR**  
**KABUPATEN PAMEKASAN**

**MOHAMMAD JASIN, M.si**

Pembina TK I

NIP.19760502 199412 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD HAMBALI, S.Sos  
Jabatan : Plt. Camat Kadur  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi  
Jabatan : Bupati Pamekasan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Pamekasan, 01 Januari 2021  
PIHAK KESATU,

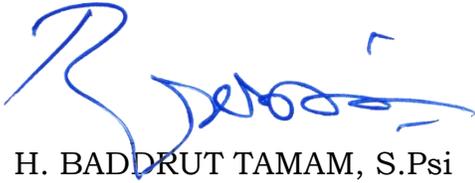
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
UNIT KERJA KECAMATAN KADUR  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	91
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kecamatan	Persentase jenis pelayanan yang dilaksanakan secara berkualitas	94%
3.	Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditangani	97%
4.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa	Persentase masyarakat desa yang telah diberdayakan	95%
		Persentase desa yang telah dibina	98%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan	Rp. 2,519,018,336	APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 7,078,000	APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 33,340,000	APBD
4. Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 47,418,000	APBD
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 17,824,000	APBD

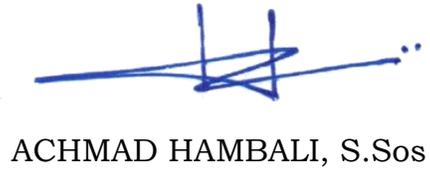
Pamekasan, 01 Januari 2021

PIHAK KEDUA,



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

PIHAK KESATU,



ACHMAD HAMBALI, S.Sos